



Media Title	Kompas		
Head Line	Tol Tanjung Priok, Pembebasan Lahan Belum Selesai		
Date	17 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	27	Article Size	
Journalist	MKN	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

TOL TANJUNG PRIOK

Pembebasan Lahan Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Tol Tanjung Priok terhambat. Hingga Rabu (16/4), 44 bidang tanah yang diperlukan belum bebas. Pembangunan ruas tol sepanjang 11,4 kilometer yang ditargetkan selesai tahun 2015 ini terancam molor.

"Pembebasan lahan menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya berkepentingan untuk mengeceknya secara rutin. Wali Kota (Jakarta Utara) menargetkan pembebasan 11 bidang tanah di Kalibaru rampung bulan depan," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau proyek tersebut di Simpang Jampea, Jakarta Utara, Rabu siang.

Selain 11 bidang seluas sekitar 2.000 meter persegi di Kalibaru, Kecamatan Cilincing, juga ada 33 bidang tanah seluas 2.360 meter persegi yang belum bebas. Lokasinya berada di sekitar Jalan Sulawesi di Koja, Kecamatan Koja. Akibatnya, pembangunan Tol Tanjung Priok terputus di dua titik itu.

Ketua Panitia Pembebasan Tanah Tol Tanjung Priok yang juga Sekretaris Kota Jakarta Utara Junaedi mengatakan, 11 bidang tanah di Kalibaru merupakan tanah negara yang hak pengelolannya dipegang PT Pelindo. Namun, warga berkekuh menuntut ganti rugi karena merasa telah tinggal di lokasi itu bertahun-tahun.

"Penghuni 11 bidang tanah itu menuntut ganti rugi Rp 10 juta per meter persegi. Padahal, tim penilai memutuskan harga tanah di lokasi itu Rp 1,9 juta per meter persegi dan nilai jual obyek pajak (NJOP) hanya Rp 700.000 per meter persegi. Kami tawarkan sesuai rekomendasi tim penilai, tetapi mereka menolaknya," kata Junaedi.

Adapun pemilik 33 bidang lahan di Jalan Sulawesi menuntut pembayaran ganti rugi Rp 35 juta per meter persegi. Padahal, tim penilai memutuskan harga tanah Rp 12 juta per meter persegi dan NJOP hanya sekitar Rp 6 juta per meter persegi.

"Kami telah menitipkan uang pengganti lahan di pengadilan karena prosedur pembebasan lahan telah kami tempuh. Warga yang belum sepakat harus mengurusnya di pengadilan," ujarnya.

Junaedi menyatakan akan me-

ngejar target pembebasan lahan selama satu bulan.

"Kami dekati satu per satu pemilik dan penghuni tanah. Mayoritas telah setuju dengan nilai yang kami tawarkan. Hanya ada beberapa orang yang menolaknya," kata Junaedi.

68 persen

Tol Tanjung Priok dibangun membentang dari Cilincing hingga Plumpang sejak 2008. Tol ini merupakan bagian dari jaringan tol di Jabodetabek yang terhubung dengan Tol Lingkar Luar (JORR), Tol Dalam Kota, dan Tol Pelabuhan.

Akibat keterlambatan pembebasan lahan, proyek pembangunan Tol Tanjung Priok ini molor. Di seksi E2 sepanjang 2,74 kilometer (Cilincing-Jampea) yang ditargetkan selesai pada Agustus 2014, misalnya, saat ini masih terputus di Kalibaru. Sementara seksi NS-Link sepanjang 2,24 kilometer (Jampea-Jalan Sulawesi) sudah mundur dari target penyelesaian pada Januari 2014.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto memperkirakan, proyek pembangunan Tol Tanjung Priok telah mencapai 68 persen. "Penyelesaian pembangunan terkendala pembebasan lahan. Secara teknik pengerjaan tidak ada kendala berarti," ujarnya.

Menurut sejumlah pelaksana di lapangan, selain lahan yang belum bebas, pembangunan juga terkendala jaringan utilitas di lokasi tersebut yang semrawut. Kabel listrik, telepon, jaringan pipa air, pipa gas, dan serat optik malang melintang di dalam dan luar lokasi proyek tol.

Keberadaan tol tersebut akan meningkatkan kapasitas jalan dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan itu. Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok pun diharapkan lebih lancar.

Sejumlah sopir kerap mengeluhkan kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di jalan karena jalan macet di tiga jalur utama menuju pelabuhan terbesar di Indonesia itu, baik dari timur melalui Jalan Cakung-Cilincing, dari selatan melalui Jalan Yos Sudarso, maupun dari barat Jalan RE Martinata. (MKN)